



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

INOVASI PENYALURAN BBM DAN LPG BERSUBSIDI

Niken Paramita Purwanto

Analisis Legislatif Ahli Muda
niken.paramita@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Besaran kuota bahan bakar minyak (BBM) dan *liquified petroleum gas* (LPG) bersubsidi tahun 2024 telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,5 juta kiloliter (kl) untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak tanah, 17,8 juta kl untuk JBT solar, dan 8,03 juta metrik ton (MT) untuk LPG 3 kilogram (kg). PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi tersebut ke masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga pun siap mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok Indonesia.

Khusus untuk penyaluran LPG 3 kg, perlu ditata ulang. Sebab, pola distribusi terbuka membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh komoditas bersubsidi ini. Akibatnya, konsumsi LPG 3 kg terus meningkat yang berdampak pada peningkatan anggaran subsidi dalam APBN. Pembinaan distribusi pun sudah mulai dilakukan. Pemerintah mengubah penyaluran LPG 3 kg dari berbasis komoditas ke penerima manfaat per 1 Januari 2024. Artinya, hanya pengguna terdaftar saja yang diperbolehkan membeli LPG 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penyesuaian data konsumen LPG 3 kg berbasis sistem *Merchant Apps Lite* sendiri tengah dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 sampai 7.

Mempertimbangkan kesiapan data, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi, memperbolehkan konsumen yang belum terdata melakukan transaksi pembelian LPG 3 kg setelah melakukan pendaftaran *on the spot* di sub-penyalur atau pangkalan resmi. Bahkan, Kementerian ESDM mengusulkan agar pengecer bisa diangkat menjadi sub-penyalur. Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui *logbook* juga menjadi tantangan. Kondisi ini mendorong pemerintah memperpanjang tenggat waktu pendataan hingga akhir Mei 2024. Pemerintah pun masih memberi opsi lain. Sub-penyalur boleh menjual LPG 3 kg ke pengecer maksimum 20% dari alokasi sub-penyalur per bulan sesuai Surat Dirjen Migas Kementerian ESDM ke PT Pertamina (Persero). Namun, pasokan LPG 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi. Hal ini untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran. Agar kebijakan ini lebih aplikatif, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar melakukan sosialisasi di berbagai daerah, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

Digitalisasi yang diterapkan pada Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar misalnya, dapat diterapkan mulai awal tahun 2024 ini pada Program Subsidi Tepat LPG 3 kg. Tujuan inovasi ini untuk memastikan pendistribusian subsidi LPG 3 kg diterima kelompok masyarakat yang tepat. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menjelaskan bahwa Subsidi Tepat JBT Solar telah melewati uji coba pada tahun 2022 dan telah berjalan secara nasional di 514 kota dan kabupaten dengan penggunaan *QR Code* mulai Juli 2023. Pada tahun 2023, ada hampir 14 juta kl transaksi solar yang tercatat secara digital. Selanjutnya untuk pembelian LPG

3 kg, masyarakat telah diwajibkan menunjukkan KTP yang kemudian dicek melalui *Merchant Apps* Pertamina di pangkalan. Sebanyak 248 ribu lebih pangkalan di 411 kota dan kabupaten yang sudah konversi kini siap melayani Subsidi Tepat LPG 3 kg.

Selain itu, PT Pertamina Patra Niaga kini dapat mengakses *Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center* (PIEDCC). Dengan digitalisasi di *fuel* dan terminal LPG, diikuti digitalisasi SPBU, saat ini proses distribusi hingga ketersediaan stok di SPBU dan pangkalan LPG 3 kg dapat dipantau secara *real time*. Strategi tersebut menjadi upaya PT Pertamina Patra Niaga membuat penyaluran subsidi menjadi transparan.

Atensi DPR

Pemerintah telah menetapkan kuota untuk BBM dan LPG bersubsidi tahun 2024. Pemerintah pun telah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk mendistribusikan BBM dan LPG bersubsidi tersebut ke seluruh masyarakat penerima manfaat. Terkait penyaluran LPG 3 kg, perlu ditata ulang karena konsumsinya yang terus meningkat akibat pola distribusi terbuka yang berdampak pada peningkatan anggaran subsidi dalam APBN. Pembinaan distribusi pun sudah mulai dilakukan pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga yang berbasis pada data si penerima manfaat. Inovasi melalui digitalisasi yang telah diterapkan pada Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar sejak pertengahan tahun 2023 lalu mulai diterapkan pada penyaluran LPG 3 kg melalui Program Subsidi Tepat LPG 3 kg. Terkait hal ini, Komisi VII DPR RI perlu terus memantau proses distribusi BBM dan LPG bersubsidi secara berkala untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Komisi VII DPR RI juga perlu memastikan alokasi BBM dan LPG bersubsidi yang ditetapkan sudah optimal untuk kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.

Sumber

cnnindonesia.com, 16 Maret 2024;
kompas.com, 13 Maret 2024; dan
liputan6.com, 16 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024